**PERJANJIAN KERJASAMA BAGI HASIL KEGIATAN PENGELOLAAN ANGKLUNG KEBYAR MENURUT KUH PERDATA**

**(STUDI DI KARANG BATUAYA)**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

Cokorda Purwanta Ragening

NIM : D1A010111

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2015**

**PERJANJIAN KERJASAMA BAGI HASIL KEGIATAN PENGELOLAAN ANGKLUNG KEBYAR MENURUT KUH PERDATA**

**(STUDI DI KARANG BATUAYA)**

**jurnal ILMIAH**



Oleh :

Cokorda Purwanta Ragening

D1A010111

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Dr. Djumardin, SH.,MHum

NIP. 196308091988031001

**PERJANJIAN KERJASAMA BAGI HASIL KEGIATAN PENGELOLAAN ANGKLUNG KEBYAR MENURUT KUH PERDATA**

 **( STUDI DI KARANG BATUAYA )**

**COKORDA PURWANTA RAGENING**

**D1A010111**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hak dan kewajibanpara pihak dalam perjanjian kerjasama bagi hasil kegiatan pengelolaan Angklung Kebyar di Karang Batuaya, dan untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Metode penelitian yang digunakan normatif empiris. Hasil penelitian, pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan angklung di Karang batuaya imbangan para pihak, Tergantung dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak pemilik dengan pengelola. Untuk pemilik mendapat 20% yang bagi dengan pengelola, Dengan imbangan yaitu 3:1, selanjutnya 80% dibagikan kepada sekhe atau pemain angklung sebanyak 24 orang. Penyelesaiannya sengketa di Karang Batuaya masih secara kekeluargaan atas dasar saling percaya.

Kata kunci : Perjanjian Bagi Hasil, Pengelolaan, Angklung Kebyar

**COOPERATION AGREEMENT FOR RESULTS ON AGREEMENT MANAGEMENT ANGKLUNG KEBYAR FOR KUH. PERDATA**

**( STUDY IN KARANG BATUAYA )**

**ABSTRAC**

The purpose of this study to determine the rights and obligations of the parties in the agreement for the results of management activities in the Karang Batuaya kebyar Angklung, and the know the pattern of settlement of disputes in the event of a dispute. The method used empirical-normative. Results of the study, the implementation of production sharing agrement management activities in Karang Batuaya balance of the parties, depending on the agreement that has been agreed between the owner of the manager. For the owner get 20% which for the manager, the balance is 3:1, the next 80% is distributed to sekhe or Angklung player as many, as 24 people. Dispute settlement in Karang Batuaya still amicably on the basis of matual trust.

Key word : Sharing Agreement, Management and Angklung Kebyar

1. **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki beranekaragam budaya, dengan tingkat keragaman yang sangat kompleks, masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut di kenal dengan istilah masyarakat multikultural. Pada masyarakat Bali khusunya di Cakranegara pada saat *Ngaben (upacara pitra yadnya* ini merupakan upacara untuk orang yang sudah meninggal Ngaben adalah upacara penyucian roh *(atma*) fase pertama, sebagai kewajiban suci umat Hindu Bali terhadap leluhurnya, dengan melakukan prosesi pembakaran jenazah. Ngaben sendiri adalah peleburan dari ajaran agama Hindu dengan adat kebudayaan di Bali) biasanya masyarakat hindu di Cakranegara menggunakan Angklung Kebyar sebagai alat musik yang mengiringi upacara *Ngaben* tersebut. Bagi pemilik Angklung Kebyar yang tidak ingin bersusah payah untuk mengelola dan merawat Angklungnya, sering kali melakukan perjanjian bagi hasil dengan pengelola. Atas perjanjian bagi hasil yang dibuat oleh pemilik Angklung Kebyar dengan pengelola, maka para pihak akan mendapatkan hasil dari perjanjian yang dibuat. Perjanjian bagi hasil pada mulanya tunduk pada ketentuan-ketentuan Hukum Adat. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diterapkan atas dasar kesepakatan para pihak saja dan tidak pernah diatur secara tertulis. Besarnya bagian yang menjadi hak dari masing-masing pihak tidak ada keseragaman antara daerah satu dengan yang lain. pemilik memberikan wewenang kepada pengelola dikarenakan pemilik Angklung Kebyar disini memiliki lebih dari satu alat musik tradisional bali ( Gong, baleganjur dan Angklung ). Dimana menurut tradisi Hindu Bali di setiap alat musik memiliki kegunaan dan peran masing-masing. Jadi pelaksanaan perjanjian bagi hasil pengelolaan Angklung di Karang Batuaya, baik yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan seperti jangka waktu, imbangan kedua belah pihak. Perjanjian masih dibuat berdasarkan adat istiadat yang dilakukan secara turun-temurun. Berdasarkan perbedaan bagi hasil penulis tertarik mengangkat masalah mengenai perjanjian kerjasama bagi hasil kegiatan pengelolaan Angklung Kebyar menurut KUH.Perdata karena pelaksanaan bagi hasil pada tiap daerah berbeda-beda. Dan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam perjanian kerjasama bagi hasil kegiatan pengelolaan Angklung Kebyar (wanprestasi)

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. “Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama bagi hasil kegiatan pengelolaan Angklung Kebyar di Karang Batuaya”. 2. “Bagaimana cara penyelesaian sengketa dalam perjanian kerjasama bagi hasil kegiatan pengelolaan Angklung Kebyardi Karang Batuaya

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam kerjasama perjanjian bagi hasil kegiatan pengelolaan Angklung Kebyar di Karang Batuaya. b. Untuk mengetahui pola penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan.

Mamfaat dari penelitian ini adalah a). untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar derajat Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mataram. b). Hasil penelitian diharapkan mampu untuk menambah refrensi baru pustaka fakultas hukum universitas mataram dan menjadi bahan bacaan bagi pihak yang berminat untuk mengembangkan dalam tahap yang lebih lanjut

Metode penelitian ini menggunakan penelitian Normatif-Empiris, menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan sosiologis[[1]](#footnote-1). Metode analisa yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif dan kualitatif[[2]](#footnote-2). Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data lapangan dan data kepustakaan, serta jenis data yang digunakan yaitu data primer dan datasekunder[[3]](#footnote-3). Kemudian teknik dan alat pengumpulan data yang digunakan yaitu interview/wawancara

1. **PEMBAHASAN**
2. **PERJANJIAN KERJASAMA BAGI HASIL KEGIATAN PENGELOLAAN ANGKLUNG KEBYAR MENURUT KUH PERDATA (STUDI DI KARANG BATUAYA)**
3. Tinjauan umum tentang perjanjian ; Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, Perjanjian kini saya artikan sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut perjanjian itu*[[4]](#footnote-4)*

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.Ada tiga tahapan dalam membuat perjanjian menurut teori baru yaitu[[5]](#footnote-5) :

1. Tahap pracontractual yaitu adanya penawaran dan penerimaan
2. Tahap contractual yaitu adanya persesuain pernyataan kehendak antara para pihak
3. Tahap post contractual yaitu pelaksanaan perjanjian

Kitab undang – undang hukum perdata membagi perikatan yang lahir dari undang – undang ini kedalam perikatan yang lahir karena undang – undang saja, dan perikatan yang lahir karena undang – undang yang disertai dengan perbuatan manusia. Dalam golongan yang pertama, termasuk di dalam peristiwa hukum.[[6]](#footnote-6)

Isi dalam perjanjian pasal 1339 KUH.Perdata juga harus dikaitkan dengan pasal 1347 KUH. Perdata karena mengatur tentang isi perjanjian, sebagai berikut :[[7]](#footnote-7)

Dalam pasal 1339 KUH. Perdata :

 Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang

Pasal 1347 KUH.Perdata :

 Hal-hal yang menurut kebiasaan selama diperjanjikan *(bestendig gebruikelijk beding*) dianggap secara diam-diam dimasukan didalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

 Menurut soebekti, bentuk perjanjian itu dibagi dalam 3 macam yaitu[[8]](#footnote-8):

* 1. Perjanjian itu memberikan / menyerahkan suatu barang;
	2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
	3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Prosedur perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang berlaku didalam masyarakat umum, dilakukan secara lisan dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat.[[9]](#footnote-9) Sedangkan kehadiran dan bantuan kepala desa tidak merupakan syarat mutlak untuk adanya perjanjian bagi hasil, bahkan jarang dilakukan pembuatan akta dari perbuatan hukum tersebut

1. **Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kegiatan Pengelolaan Angklung Kebyar Di Karang Batuaya ;** Perjanjian bagi hasil pengelolaan Angklung Kebyar di Desa karang batuaya timbul dikarenakan pemilik angklung tidak dapat menggabungkan alat musik angklung dengan alat musik tradisional bali lainnya dalan satu tempat, agar tetap mendapatkan hasil dari angklung tersebut maka pemilik angklung memberikan wewenang kepada pengelola untuk mengurus angklung tersebut dengan cara melakukan perjanjian bagi hasil

Perjanjian yang diadakan secara lisan atau tidak tertulis mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah, tetapi pada umumnya masyarakat di Desa Karang Batuaya membuatnya secara tidak tertulis, tidak memikirkan tentang kepastian hukum dari perjanjian bagi hasil yang dibuat karena berdasarkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak.[[10]](#footnote-10)

Masyarakat di Desa Karang Batuaya membuatnya secara tidak tertulis, tidak memikirkan tentang kepastian hukum dari perjanjian bagi hasil yang dibuat karena berdasarkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. alasan tidak menggunakan atau membuat perjanjian secara tidak tertulis/lisan karena apabila membuat perjanjiaan secara tertulis biaya mahal, prosedur yang cukup panjang dan rumit, saling percaya antara kedua belah pihak, dan telah mejadi kebiasaan turun-temurun yang sering dilakukan oleh masyarakat[[11]](#footnote-11)

perjanjian sewa menyewa Angklung Kebyar biasanya dilakukan antara pengelola dengan penyewa, dengan diadakannya perundingan terlebih dahulu seperti : a. Antara pihak yang akan menyewa dengan pihak pengelola. Membicarakan apakah pembayaran dilakukan secara langsung (tunai) atau dibayarkan setengah (panjer) dan dibayarkan sepenuhnya setelah upacara selesai. b. Antara para pihak membicarakan terkait dengan angkutan yang akan membawa Angklung Kebyar tersebut ke tempat acara dan membawa alat musik tersebut ke pantai sebagai puncak acara pembuangan abu jenazah dan membawa kembali angklung kebyar tersebut kembali ke tempat pengelola. c. Menentukan berapa hari si penyewa akan menyewa Angklung Kebyar tersebut

Selain perjanjian yang sudah dibahas diatas, selain itu ada juga perjanjian yang tidak dibahas atau ditegaskan, namum berdasarkan kebiasaan setempat memang harus yang dilakukan atau dipenuhi oleh si penyewa Angklung Kebyar seperti menyediakan minuman dan makanan

Berdasarkan hasil penelitian prosedur perjanjian sewa menyewa Angklung Kebyar biasanya dilakukan antara pengelola dengan penyewa, dengan diadakannya perundingan terlebih dahulu antara pihak yang akan menyewa dengan pihak pengelola, karena pengelola sudah diberikan tanggung jawab oleh pemilik. besarnya nilai sewa dapat mempengaruhi juga bagian-bagian yang diterima oleh para pihak seperti : a. Digunakan oleh sekhe atau pemain alat musik Angklung Kebyar digunakan untuk upacara kematian, baik yang meninggal tersebut orang tua, anak, istri maupun sekhe itu sendiri. Dalam hal ini Angklung Kebyar tersebut dipakai secara cuma-cuma tanpa membebani biaya sewa. Jadi pemilik, penglola dan anggota sekhe yang lain tidak mendapatkan upah atau hasil bagian yang berupa uang. b. Jangka waktu sewa, Jangka waktu sewa sangat mempengaruhi bagian yang diterima oleh masing-masing pihak, apabila si penyewa menyewa Angklung Kebyar tersebut lebih dari satu hari, maka uang sewa dikalikan dengan harga sewa perharinya. c. Digunakan oleh anggota keluarga sekhe, Angklung Kebyar digunakan untuk upacara kematian, digunakan oleh keluarga sekhe itu sendiri seperti saudara, paman, bibik atau diluar nama dalam kartu keluarga. Dalam hal ini Angklung Kebyar tersebut dipakai dengan harga sewa yang berbeda dari pada orang lain pada umunya. Jadi penyewa membayar setengah dari harga sewa yang sudah ditetapkan pemilik.

Mengenai besarnya bagian dalam perjanjian bagi hasil ini yang diperoleh oleh masing-masing pihak, menurut kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat desa karang batuaya. Tergantung dengan perjanjian yang telah disepakati antara pihak pemilik dengan pengelola. Pemilik selaku pihak pertama mendapatkan hasil 20% dari uang sewa, yang selanjutnya dari bagian yang diterima oleh pemilik Angklung kemudian selanjutnya membagi dengan pihak kedua yaitu pengelola dengan imbangan 3 : 1

Umumnya sewa dari Angklung Kebyar tersebut sebesar Rp 3.000.000 dengan pembagian untuk pemilik Rp 600.000, selanjutnya bagian yang diterima oleh pemilik Angklung dibagi kembali dengan pengelola. Dengan imbangan pemilik Angklung Rp 450.000 dan untuk pengelola 150.000. Sisa dari bagian yang diterima oleh pemilik Angklung yang sebesar Rp 2.400.000 dibagikan kepada pengelola sebanyak 24 sekhe atau pemain[[12]](#footnote-12)

Perjanjian bagi hasil yang dibuat oleh para pihak, tidak pernah mengatur tentang jangka waktunya. Tidak pernah diaturnya jangka waktu dikarenakan didasari rasa saling percaya dan kekeluargaan antara para pihak. jadi mengenai jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan pengelola, Apabila dirasa pengelola sudah tidak mampu lagi merawat dan memelihara Angklung tersebut, pengelola dapat memberhentikan dirinya atau dapat diberhentikan oleh pemilik Angklung karna sudah tidak mampu lagi mengelola atau merawatnya.[[13]](#footnote-13)

Berakhirnya perjanjian juga bisa terjadi karena ada sebab-sebab tertentu nyakni salah satu pihak melanggar perjanjian yang di sepakati, karna pengelola tidak melaksanakan obyek yang dikelola semestinya atau dapat juga karna jangka waktu biasanya bisa pemutusan dari salah satu pihak baik dari pengelola maupun pemilik Angklung.

Timbulnya sengketa perjanjian bagi hasil pengelolaan Angklung Kebyar di Desa Karang Batuaya biasanya dikarenakan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Karena salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati, maka perjanjian kerjasama pengelolaan Angklung tersebut dapat berakhir.

1. Sifat-Sifat Pemerasan Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Kegiatan Pengelolaan Angklung Kebyar : Termasuk didalamnya perjanjian bagi hasil dapat memungkinkan timbulnya hubungan-hubungan yang mengandung unsur pemerasan oleh si pemilik Angklung Kebyar terhadap pihak yang menjadi pengelola begitupun sebaliknya

Perjanjian bagi hasil pengelolaan angklung kebyar memang memiliki unsur-unsur tolong menolong, disamping itu juga memiliki unsur-unsur pemerasan, karena pada umumnya bagian yang diterima oleh pemilik Angklung lebih besar dari pada pengelola, sedangkan pengelola tetap mengeluarkan biaya untuk latihan yang dilalukan secara berkala demi menyempurnakan gending atau lagu dalam musik Angklung Kebyar.

Sifat-sifat pemerasan perjanjian bagi hasil kegiatan pengelolaan Angklung Kebyar di desa karang batuaya : 1. Bagian hasil yang diterima pengelola Angklung Kebyar selalu lebih kecil. 2.Pengelola Angklung tetap mengeluarkan biaya untuk latihan sekhe pada tiap minggunya**.** 3.Jangka waktu dalam perjanjian bagi hasil pengelolaan Angklung Kebyar tidak ada jangka waktu yang mengatur para pihak. Jadi pihak penggelola dapat diberhentikan kapan saja

1. Cara penyelesaian sengketa dalam perjanian kerjasama bagi hasil kegiatan pengelolaan Angklung Kebyar di Karang Batuaya : sengketa perjanjian bagi hasil pengelolaan angklung, para pihak menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan dimana sengketa ini pada umumnya terjadi pada para pihak yang masih dalam lingkungan atau masih dalam hubungan keluarga. Para pihak menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dengan cara musyawarah, untuk mendapat atau menghasilkan penyelesaian sengketa yang menguntungkan kedua belah pihak dan menjaga hubungan baik antar keluarga dengan kesepakatan yang di buat secara sukarela.[[14]](#footnote-14)

 penyelesaian sengketa apapun di Desa Karang Batuaya Penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil pengelolaan Angklung Kebyar.pertama-pertama masyarakat menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, dimana diselesaikan antara kedua belah pihak saja, hal ini dilakukan karena untuk menjaga hubungan kedua belah pihak tetap baik. Terkecuali apabila sengketa benar-benar rumit dan tidak menemukan penyelesaian, terhadap upaya perdamaian yang dilakukan secara kekeluargaan jika tidak menemukan hasil maka kedua belah pihak sepakat meminta bantuan kepada kepala lingkungan untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa secara damai berdasarkan musyawarah[[15]](#footnote-15)

 Pola penyelesaian tahap pertama sengketa perjanjian bagi hasil atau sengketa apapun yang terjadi di masyarakat, para pihak pertama-tama melaporkannya kepada kepala kampung, Atas pengaduan itu kepala kampung melaporkan sengketa yang terjadi kepada kelurahan, atas laporan yang terjadi lurah membuat jadwal atau menentukan hari untuk memanggil kedua belah pihak yang bertujuan untuk mendamaikan agar mendapat solusi yang terbaik terhadap sengketa yang terjadi, atas pemanggilan para pihak terhadap sengketa yang terjadi diselesaikan secara kekeluargaan dengan lurah bertugas menjadi penengah atau mediator

 Penyelesaian sengketa apabila tahap pertama kedua belah pihak belum menemukan kesepakatan. Pada tahap kedua lurah akan menjadwal ulang kembali untuk kembali memanggil guna mempertemukan kembali para pihak agar dapat menyelesaikan sengketanya. Penyelesaiannya tetap dengan cara atau tahap seperti yang pertama, dimana lurah tetap menjadi penengah atau mediator dan disaksikan oleh kepala kampung tempat para pihak bertempat tinggal.

 Apabila dalam tahap kedua para pihak juga tidak menemukan kesepakatan atau solusi. Lurah dan kepala kampung lepas tangan atau sudah tidak mampu menjadi penengah karna tidak menemukan solusi antara kedua belah pihak. Maksudnya adalah para pihak diberikan kebebasan untuk memilih jalur penyelesaiannya yaitu melalui jalur pengadilan.[[16]](#footnote-16)

1. **PENUTUP**

**Kesimpulan**

* + - * 1. Dari uraian pembahasan di atas yang telah dipaparkan sekaligus menjawab pokok-pokok permasalahan, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Pelaksanaan perjanjian bagi hasil Angklung Kebyar di Desa Karang Batuaya perjanjian yang diadakan secara lisan atau tidak tertulis berdasarkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Dengan pembagian atau imbanggan Pemilik selaku pihak pertama mendapatkan hasil 20% dari uang sewa, yang selanjutnya dari bagian yang diterima oleh pemilik Angklung kemudian selanjutnya membagi dengan pihak kedua yaitu pengelola dengan imbangan 3 : 1. Perjanjian bagi hasil yang dibuat oleh para pihak, tidak pernah mengatur tentang jangka waktunya. Tidak pernah diaturnya jangka waktu dikarenakan didasari rasa saling percaya dan kekeluargaan antara para pihak. 2). Cara penyelesaian sengketa, penyelesaian sengketa bagi hasilAngklung Kebyar yaitu dengan cara mediasi, para pihak yang bersengketa melakukan komunikasi yang terkait dengan sengketa yang terjadi untuk mencari dan mendapatkan solusi yang terbaik yang menguntungkan kedua belah pihak. penyelesaian sengketa apapun di Desa Karang Batuaya. Penyelesaian sengketa perjanjian bagi hasil pengelolaan Angklung Kebyar.Pertama-pertama masyarakat menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, dimana diselesaikan antara kedua belah pihak saja, hal ini dilakukan karena untuk menjaga hubungan kedua belah pihak tetap baik. Terkecuali apabila sengketa benar-benar rumit dan tidak menemukan penyelesaian, terhadap upaya perdamaian yang dilakukan secara kekeluargaan jika tidak menemukan hasil maka kedua belah pihak sepakat meminta bantuan kepada kepala lingkungan untuk menjadi mediator

**SARAN**

1). Diharapkan bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian bagi hasil, agar perjanjian bagi hasil yang sudah dibuat tidak menimbulkan sengketa dikemudian hari. 2). Mengingat perjanjian bagi hasil sudah banyak dilakukan. Maka untuk meningkatkan kesadaran hukum perlu adanya penyuluhan tentang pentingnya perjanjian dibuat secara tertulis, agar masyarakat dapat mengetahui mengapa perjanjian bagi hasil itu perlu dibuat secara tertulis

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **Buku-Buku :**

A.P. Parlindungan, undang-undang bagi hasil di indonesia. Alumni : Bandung, 1991

Bahder Johan Nasution, SH., SM., M.Hum. metode penelitian ilmu hukum. Cet 1. cv. Mandar Maju : Bandung, 2008.

H.S. Salim. Pengantar Hukum Perdata tertulis ( BW ). Sinar Grafika : Jakarta, 2008

Kartini Muljadi dan gunawan widjaja, perikatan pada umumnya, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

R. Wirjono Prodjodikoro, sh, Azas-azas hukum perjanjian, cet ke 9, Sumur Bandung : Bandung, 1981

Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,Universitas Indonesia : Jakarta, 2006

Subekti. S.H. aneka perjanjian , cet 4, Alumni : Bandung , 1981

1. DR. Bahder Johan Nasution, SH., SM., M.Hum. metode penelitian ilmu hukum. Cet 1. Bandung : cv. Mandar Maju,2008.hlm. 92 [↑](#footnote-ref-1)
2. Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2006), hlm. 32 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibid. Soejono Soekanto, hlm 167 [↑](#footnote-ref-3)
4. Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, sh, Azas-azas hukum perjanjian, cet. 9 (Bandung : Sumur Bandung, 1981), hlm. 9 [↑](#footnote-ref-4)
5. Salim H.S. Pengantar Hukum Perdata tertulis ( BW ), (Jakarta: sinar grafika,2008), hlm. 161 . [↑](#footnote-ref-5)
6. Kartini Muljadi dan gunawan widjaja, perikatan pada umumnya, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 42-45 [↑](#footnote-ref-6)
7. Ibid, hlm. 69. [↑](#footnote-ref-7)
8. Soebekti,*hukum perjanjian*, PT Intermassa, Jakarta, Tahun 1990,Hal 1 [↑](#footnote-ref-8)
9. A.P. Parlindungan, undang-undang bagi hasil di indonesia. Bandung, Alumni, 1991, hlm 2 [↑](#footnote-ref-9)
10. Wawancara dengan pemilik angklung, Bapak I Nengah Gusia., Tanggal 20 September 2015 [↑](#footnote-ref-10)
11. Wawancara kepala lingkungan desa karang batuaya, Bapak I Cokorda Nyoman Sutriana, Tanggal 20 September 2015 [↑](#footnote-ref-11)
12. Wawancara dengan pengelola angklung, Bapak Cokorda Jiestha., Tanggal 20 September 2015 [↑](#footnote-ref-12)
13. Ibid,Bapak Cokorda Jiestha [↑](#footnote-ref-13)
14. Cokorda Jiestha ,*Op.cit.* [↑](#footnote-ref-14)
15. Ibid. Cokorda Jiestha. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*. Cokorda Nyoman Sutriana [↑](#footnote-ref-16)